

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lembang, 30 Desember 2020
Kepala Balai,

Dr. Ir. Wiratno, M.Env.Mgt
NIP. 196307021989031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.4. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lembang, 30 Desember 2020
Kepala Balai,

Dr. Ir. Wiratno, M.Env.Mgt
NIP. 196307021989031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp888.023.028,00 atau mencapai 109,54% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp810.660.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp14.731.298.322,00 atau mencapai 98,35% dari alokasi anggaran sebesar Rp14.977.818.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp68.501.956.782,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp87.525.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp68.396.529.408,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp17.902.374,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp68.501.956.782,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp810.137.178,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp22.820.671.987,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-22.010.534.809,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp104.673.793,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-21.905.861.016,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp78.277.777.707,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-21.905.861.016,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-1.713.235.203,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.843.275.294,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp68.501.956.782,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	810.660.000,00	888.023.028,00	109,54	297.444.157,00
Jumlah Pendapatan		810.660.000,00	888.023.028,00	109,54	297.444.157,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	7.996.250.000,00	7.850.676.356,00	98,18	7.725.913.796,00
Belanja Barang	B.4.	6.651.668.000,00	6.551.221.966,00	98,49	80.682.108.210,00
Belanja Modal	B.5.	329.900.000,00	329.400.000,00	99,85	1.849.440.550,00
Jumlah Belanja		14.977.818.000,00	14.731.298.322,00	98,35	90.257.462.556,00

II. NERACA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1.	0,00	3.902.500.000,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	79.995.000,00	120.000.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	-39.997.500,00	-60.000.000,00
Persediaan	C.1.4.	47.527.500,00	2.209.298.850,00
Jumlah Aset Lancar		87.525.000,00	6.171.798.850,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	47.379.008.000,00	47.379.008.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	19.149.641.646,00	19.213.426.646,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	17.183.372.484,00	17.721.844.484,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2.442.828.060,00	2.442.828.060,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	403.126.882,00	403.126.882,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-18.161.447.664,00	-15.073.571.064,00
Jumlah Aset Tetap		68.396.529.408,00	72.086.663.008,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	6.115.000,00	6.115.000,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	474.150.400,00	360.365.400,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-462.363.026,00	-347.164.551,00
Jumlah Aset Lainnya		17.902.374,00	19.315.849,00
Jumlah Aset		68.501.956.782,00	78.277.777.707,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	68.501.956.782,00	78.277.777.707,00
Jumlah Ekuitas		68.501.956.782,00	78.277.777.707,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		68.501.956.782,00	78.277.777.707,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	810.137.178,00	344.258.030,00
JUMLAH PENDAPATAN		810.137.178,00	344.258.030,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	7.850.676.356,00	7.725.913.796,00
Beban Persediaan	D.3.	1.644.553.101,00	3.845.244.400,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.045.366.710,00	9.848.596.944,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	963.793.116,00	611.315.140,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	924.799.482,00	4.661.723.445,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	2.201.273.850,00	49.879.072.000,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	3.902.500.000,00	7.046.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	2.307.711.872,00	1.950.013.477,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10.	-20.002.500,00	54.000.000,00
JUMLAH BEBAN		22.820.671.987,00	85.621.879.202,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-22.010.534.809,00	-85.277.621.172,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	118.188.374,00	295.156.277,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	13.514.581,00	539.359.581,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		104.673.793,00	-244.203.304,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-21.905.861.016,00	-85.521.824.476,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1.	78.277.777.707,00	74.117.345.844,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-21.905.861.016,00	-85.521.824.476,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-1.713.235.203,00	-2.121.563.710,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	-817.872.000,00	-2.191.046.000,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	-895.363.203,00	69.482.290,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	13.843.275.294,00	91.803.820.049,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	68.501.956.782,00	78.277.777.707,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat didirikan pada tanggal 1 April 1994 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 798/Kpts/OT.210/12/94. Pada waktu itu BPTP Jawa Barat disebut dengan nama BPTP Lembang dengan wilayah tugas meliputi Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan perkembangannya Keputusan Menteri Pertanian RI No. 798/Kpts/OT.210/12/94 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu melalui Peraturan Menteri Pertanian RI No. 350/Kpts/OT.210/6/2001, namanya berubah menjadi BPTP Jawa Barat dan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 20/Permentan/OT.140/3/2013.

Sejak tahun 1994 telah banyak yang dilakukan BPTP Jawa Barat, dan diantaranya telah banyak pula yang dimanfaatkan oleh *stakeholders* maupun petani. Namun demikian masih banyak pula masalah sepenuhnya belum tertangani pada periode waktu tersebut dan oleh karenanya diperlukan upaya untuk mengantisipasi masalah tersebut dan masalah yang akan timbul pada lima tahun berikutnya.

BPTP Jawa Barat menyadari bahwa dinamika pembangunan pertanian yang begitu pesat diiringi dengan berbagai permasalahan seperti perubahan iklim yang dinamis, konversi sumber daya lahan pertanian ke non pertanian, pelarian tenaga kerja pertanian kepada lapangan pekerjaan lain, penguasaan lahan pertanian yang semakin sempit serta kurang responnya petani kepada inovasi yang diintroduksi menuntut BPTP Jawa Barat untuk lebih banyak lagi berupaya menghasilkan rakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dibutuhkan oleh petani.

Disamping itu, sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan ujung tombak Kementerian Pertanian di daerah, BPTP Jawa Barat harus lebih berperan dalam menyukseskan visi dan misi Kementerian Pertanian di daerah, tidak hanya melalui rakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dihasilkan namun juga melalui peran kelembagaan yaitu sebagai intermediasor kelembagaan lain dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Peran sebagai intermediasor kelembagaan diperlukan mengingat adanya peran kelembagaan lain dalam mendukung keberhasilan misi Kedaulatan Pangan. Kelembagaan lain tersebut sudah barang tentu memerlukan rujukan arah dan implementasi dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna. Kondisi inilah yang harus diisi oleh BPTP Jawa Barat untuk menjadikan kelembagaan tersebut menjadi lembaga yang memiliki akselerasi yang sama cepatnya dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Renstra BPTP Jawa Barat 2015-2019 disusun selain untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pengkajian BPTP juga menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, menetapkan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diversifikasi. Renstra BPTP Jawa Barat

2015-2019 sebagai kelanjutan dari Renstra BPTP Jawa Barat 2010-2014 Renstra ini diharapkan bisa menjadi skenario jangka menengah BPTP Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang meliputi manajemen organisasi, pembinaan SDM, peningkatan sarana dan prasarana, dan pendanaan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	200.000.000,00	200.000.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	610.660.000,00	610.660.000,00
Jumlah Pendapatan	810.660.000,00	810.660.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.352.743.000,00	7.867.743.000,00
Belanja Lembur	128.507.000,00	128.507.000,00
Belanja Barang Operasional	1.407.204.000,00	1.487.754.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.979.071.000,00	925.214.000,00
Belanja Barang Persediaan	2.860.524.000,00	1.959.900.000,00
Belanja Jasa	980.100.000,00	688.706.000,00
Belanja Pemeliharaan	597.934.000,00	660.344.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.969.450.000,00	929.750.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	450.000.000,00	279.900.000,00
Jumlah Belanja	19.775.533.000,00	14.977.818.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp888.023.028,00 atau mencapai 109,54% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp810.660.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0,00	990.000,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	200.000.000,00	239.031.678,00	119,52
Pendapatan Lain-lain	0,00	37.880.850,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	610.660.000,00	610.120.500,00	99,91
Jumlah	810.660.000,00	888.023.028,00	109,54

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 198,55% dibandingkan TA 2019. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	990.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	1.800.000,00	- 100,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	239.031.678,00	281.408.030,00	-15,06
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	2.850.000,00	- 100,00
Pendapatan Lain-lain	37.880.850,00	11.386.127,00	232,69
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	610.120.500,00	0,00	0,00
Jumlah	888.023.028,00	297.444.157,00	198,55

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp14.731.298.322,00 atau 98,35% dari anggaran belanja sebesar Rp14.977.818.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	7.996.250.000,00	7.851.231.798,00	98,19
Belanja Barang	6.651.668.000,00	6.551.221.966,00	98,49
Belanja Modal	329.900.000,00	329.400.000,00	99,85
Total Belanja Kotor	14.977.818.000,00	14.731.853.764,00	98,36
Pengembalian Belanja		-555.442,00	0,00
Total Belanja	14.977.818.000,00	14.731.298.322,00	98,35

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -83,68% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Refocusing Anggaran terkait Pandemi Covid-19

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	7.850.676.356,00	7.725.913.796,00	1,61
Belanja Barang	6.551.221.966,00	80.682.108.210,00	-91,88
Belanja Modal	329.400.000,00	1.849.440.550,00	-82,19
Total Belanja	14.731.298.322,00	90.257.462.556,00	-83,68

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.850.676.356,00 dan Rp7.725.913.796,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,61% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Kenaikan Pangkat Reguler, Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Jabatan Fungsional

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.722.778.798,00	7.599.717.699,00	1,62
Belanja Lembur	128.453.000,00	128.392.000,00	0,05
Jumlah Belanja Kotor	7.851.231.798,00	7.728.109.699,00	1,59
Pengembalian Belanja Pegawai	-555.442,00	-2.195.903,00	-74,71
Jumlah Belanja	7.850.676.356,00	7.725.913.796,00	1,61

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.551.221.966,00 dan Rp80.682.108.210,00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar -91,88% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kegiatan TA. 2020 tidak Sebesar Kegiatan TA. 2019

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.485.091.000,00	1.422.482.000,00	4,40
Belanja Barang Non Operasional	881.530.500,00	7.744.033.582,00	-88,62
Belanja Barang Persediaan	1.920.973.377,00	2.733.318.600,00	-29,72
Belanja Jasa	678.745.210,00	682.081.362,00	-0,49
Belanja Pemeliharaan	660.082.397,00	378.783.040,00	74,26
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	924.799.482,00	4.661.723.445,00	-80,16
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	63.059.686.181,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	6.551.221.966,00	80.682.108.210,00	-91,88
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	6.551.221.966,00	80.682.108.210,00	-91,88

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp329.400.000,00 dan Rp1.849.440.550,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar -82,19% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pada Pos Belanja Modal TA. 2020 banyak yang di realokasi karena terkait Refocusing Anggaran kaitannya dengan Pandemi Covid-19

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	342.684.775,00	-85,41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	279.400.000,00	1.506.755.775,00	-81,46
Jumlah Belanja Kotor	329.400.000,00	1.849.440.550,00	-82,19
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	329.400.000,00	1.849.440.550,00	-82,19

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp342.684.775,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami penurunan sebesar -85,41% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Untuk Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2020 juga Mengalami Refocusing

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	342.684.775,00	-85,41
Jumlah Belanja Kotor	50.000.000,00	342.684.775,00	-85,41
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	50.000.000,00	342.684.775,00	-85,41

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp279.400.000,00 dan Rp1.506.755.775,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -81,46% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan juga Sama mengalami Refocusing terkait Pandemi Covid-19

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	279.400.000,00	1.506.755.775,00	-81,46
Jumlah Belanja Kotor	279.400.000,00	1.506.755.775,00	-81,46
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	279.400.000,00	1.506.755.775,00	-81,46

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.902.500.000,00.

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020
Penjelasan 1	0,00
Penjelasan 2	0,00
dst...	0,00
Jumlah	0,00

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp79.995.000,00 dan Rp120.000.000,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	79.995.000,00	120.000.000,00
Jumlah	79.995.000,00	120.000.000,00

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-39.997.500,00 dan Rp-60.000.000,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp47.527.500,00 dan Rp2.209.298.850,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	169.853.000,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	238.100.000,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	1.793.320.850,00
Bahan Baku	47.527.500,00	8.025.000,00
Jumlah	47.527.500,00	2.209.298.850,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp47.379.008.000,00 dan Rp47.379.008.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.149.641.646,00 dan Rp19.213.426.646,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	19.213.426.646,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	50.000.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-113.785.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	19.149.641.646,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-15.052.299.539,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	4.097.342.107,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Pembelian alat Absen Digital sebanyak 2 Unit
2. Pembelian 3 Unit Alat Scanner dan 1 Unit Portabel Speaker

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp17.183.372.484,00 dan Rp17.721.844.484,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	17.721.844.484,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	279.400.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-817.872.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	17.183.372.484,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-2.406.465.510,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	14.776.906.974,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Renovasi Lantai Gedung Kantor
2. Renovasi Pintu Masuk Loby Kantor

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.442.828.060,00 dan Rp2.442.828.060,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp403.126.882,00 dan Rp403.126.882,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-18.161.447.664,00 dan Rp-15.073.571.064,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	19.149.641.646,00	-15.052.299.539,00	4.097.342.107,00
2.	Gedung dan Bangunan	17.183.372.484,00	-2.406.465.510,00	14.776.906.974,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.442.828.060,00	-702.682.615,00	1.740.145.445,00
4.	Aset Tetap Lainnya	403.126.882,00	0,00	403.126.882,00
Akumulasi Penyusutan		39.178.969.072,00	-18.161.447.664,00	21.017.521.408,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.115.000,00 dan Rp6.115.000,00. Aset Tak Berwujud

merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.115.000,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp474.150.400,00 dan Rp360.365.400,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	360.365.400,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	113.785.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	474.150.400,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-456.248.026,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	17.902.374,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

Tidak terjadi Penambahan ataupun Pengurangan aset yang signifikan

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-462.363.026,00 dan Rp-347.164.551,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	-6.115.000,00	0,00
2.	Aset Lain-lain	474.150.400,00	-456.248.026,00	17.902.374,00
Akumulasi Penyusutan		480.265.400,00	-462.363.026,00	17.902.374,00

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp68.501.956.782,00 dan Rp78.277.777.707,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp810.137.178,00 dan Rp344.258.030,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	2.850.000,00	-100,00
Pendapatan Pendidikan Lainnya	400.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	609.720.500,00	0,00	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.100.000,00	2.325.000,00	-9,68
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	990.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	179.455.000,00	331.225.030,00	-45,82
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0,00	4.600.000,00	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.471.678,00	3.258.000,00	436,27
Jumlah	810.137.178,00	344.258.030,00	135,33

- Pendapatan Dari Kerjasama Penelitain antara BPTP Jabar dengan PT Pupuk Indonesia
- Pendapatan dari Penjualan Hasil Pertanian salah satunya berupa penerimaan TRG

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.850.676.356,00 dan Rp7.725.913.796,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	5.094.957.540,00	5.213.249.920,00	-2,27
Beban Pembulatan Gaji PNS	69.703,00	81.328,00	-14,29
Beban Tunj. Anak PNS	114.281.510,00	118.585.442,00	-3,63
Beban Tunj. Beras PNS	258.466.980,00	265.274.460,00	-2,57
Beban Tunj. Fungsional PNS	871.040.000,00	779.630.000,00	11,72
Beban Tunj. PPh PNS	39.416.729,00	37.874.376,00	4,07
Beban Tunj. Struktural PNS	32.760.000,00	31.500.000,00	4,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	381.060.894,00	383.600.270,00	-0,66
Beban Tunjangan Umum PNS	129.900.000,00	141.860.000,00	-8,43
Beban Uang Lembur	128.453.000,00	128.392.000,00	0,05
Beban Uang Makan PNS	800.270.000,00	625.866.000,00	27,87
Jumlah	7.850.676.356,00	7.725.913.796,00	1,61

Diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan Modal

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.644.553.101,00 dan Rp3.845.244.400,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	32.500,00	1.294.754.440,00	-100,00
Beban Persediaan konsumsi	1.641.685.601,00	2.529.634.060,00	-35,10
Beban persediaan lainnya	2.835.000,00	20.855.900,00	-86,41
Jumlah	1.644.553.101,00	3.845.244.400,00	-57,23

Beban Persediaan Bahan Baku yang bersumber dari kegiatan UPBS

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.045.366.710,00 dan Rp9.848.596.944,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Bahan	268.455.000,00	2.839.768.582,00	-90,55
Beban Barang Non Operasional Lainnya	332.815.500,00	870.015.000,00	-61,75
Beban Barang Operasional Lainnya	82.585.000,00	70.700.000,00	16,81
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	181.464.000,00	270.064.000,00	-32,81
Beban Honor Output Kegiatan	280.260.000,00	4.034.250.000,00	-93,05
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	179.316.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultan	25.000.000,00	20.000.000,00	25,00
Beban Jasa Lainnya	0,00	6.720.000,00	-100,00
Beban Jasa Profesi	75.000.000,00	378.700.000,00	-80,20
Beban Keperluan Perkantoran	1.181.210.000,00	1.057.980.000,00	11,65
Beban Langganan Listrik	102.981.378,00	109.583.734,00	-6,02
Beban Langganan Telepon	2.297.832,00	11.327.628,00	-79,71
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	39.832.000,00	23.738.000,00	67,80
Beban Sewa	294.150.000,00	155.750.000,00	88,86
Jumlah	3.045.366.710,00	9.848.596.944,00	-69,08

Beban atas barang jasa pada BPTP Jawa Barat TA. 2020 merupakan kompilasi dari keperluan atas belanja yang bersifat guna menunjang keperluan perkantoran dalam hal ini kebutuhan rumah tangga Balai

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp963.793.116,00 dan Rp611.315.140,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	185.538.000,00	100.907.500,00	83,87
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	474.544.397,00	277.875.540,00	70,78
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	51.600.500,00	30.839.500,00	67,32
Beban Persediaan suku cadang	252.110.219,00	201.692.600,00	25,00
Jumlah	963.793.116,00	611.315.140,00	57,66

Peleburan Gedung Kantor, Perawatan Kendaraan Dinas, Perawatan Suku Cadang

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp924.799.482,00 dan Rp4.661.723.445,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	909.349.482,00	4.536.773.445,00	-79,96
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.450.000,00	124.950.000,00	-87,64
Jumlah	924.799.482,00	4.661.723.445,00	-80,16

Perjalanan Dinas untuk mendukung tugas dan Tupoksi Kegiatan Pengkajian di BPTP Jawa Barat

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.103.773.850,00 dan Rp56.925.072.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.793.320.850,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	3.902.500.000,00	7.046.000.000,00	-44,61
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	238.100.000,00	5.009.466.150,00	-95,25
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	44.869.605.850,00	-100,00
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	169.853.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.103.773.850,00	56.925.072.000,00	-89,28

Pada TA 2020 BPTP Jawa Barat sudah melaksanakan Kegiatan kepada Pegawai/Masyarakat dalam bentuk bantuan Barang yang selanjutnya telah disalurkan kepada Masyarakat yang berhak

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.307.711.872,00 dan Rp1.950.013.477,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	0,00	1.528.750,00	-100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	813.145.374,00	350.100.696,00	132,26

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Irigasi	18.664.874,00	18.664.874,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.314.316,00	7.358.283,00	-27,78
Beban Penyusutan Jaringan	44.913.368,00	44.469.648,00	1,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.413.475,00	1.413.475,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.424.260.465,00	1.526.477.751,00	-6,70
Jumlah	2.307.711.872,00	1.950.013.477,00	18,34

Penyusutan Gedung dan Bangunan, Irigasi, Jaringan dan peralatan dan mesin sudah tertuang dalam aplikasi SIMAK BMN

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidakterttagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-20.002.500,00 dan Rp54.000.000,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNBK	-20.002.500,00	54.000.000,00	-137,04
Jumlah	-20.002.500,00	54.000.000,00	-137,04

D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-13.514.581,00	-539.359.581,00	-97,49
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0,00	1.800.000,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	80.307.524,00	281.970.150,00	-71,52
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	27.370.500,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.584.100,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	6.926.250,00	11.386.127,00	-39,17
Jumlah	104.673.793,00	-244.203.304,00	-142,86

Pengembalian/Denda atas keterlambatan pekerjaan dan Pengembalian Belanja Pegawai telah dilakukan sesuai dengan aturan perbendaharaan

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp78.277.777.707,00 dan Rp74.117.345.844,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-21.905.861.016,00 dan Rp-85.521.824.476,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-1.713.235.203,00 dan Rp-2.121.563.710,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-817.872.000,00 dan Rp-2.191.046.000,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2020.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Gedung dan Bangunan	-817.872.000,00
Jumlah	-817.872.000,00

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-895.363.203,00 dan Rp69.482.290,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-895.363.203,00
Jumlah	-895.363.203,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.843.275.294,00 dan Rp91.803.820.049,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	14.731.298.322,00
Diterima dari Entitas Lain	-888.023.028,00
Jumlah	13.843.275.294,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp-888.023.028,00 sedangkan DKEL sebesar Rp14.731.298.322,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp68.501.956.782,00 dan Rp78.277.777.707,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- Tindak lanjut hasil temuan audit Inspektorat Nomor R.48/PW.140/G.4/01/2018 perihal Pencatatan MAK 526 pada Persediaan sudah dilakukan dan tertuang dalam Berita Acara Stock Opname Persediaan dan sudah di jelaskan
- Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada BPTP Jawa Barat TA 2020, tidak ada penggantian Pejabat Pengelola Keuangan pada Penanda tangan SPM

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Pada TA. 2020 terdapat refocusing anggaran terkait Pandemi Covid-19, Adapun realokasi anggaran ditujukan untuk Peningkatan Daya Tahan Tubuh Pegawai dan Dilakukan Juga Screening Rapid Test dan Swab.

Revisi DIPA ke 5 terkait Anggaran Refocusing untuk penanganan Pandemi Covid-19 terbagi dua akun, dan semua hampir terealisasi semuanya dengan rincian sebagai berikut :

- Akun 521841 Belanja Barang Persediaan Bahan Bantu Penanganan Covid-19 dengan Pagu Rp. 377.084.000,- dan terealisasi Sebesar Rp. 376.400.000,- . Anggaran ini diperuntukan untuk pembelian Vitamin, Masker, Handsanitizer, Disinfektan, Face Shield, Madu, Roll on, Kayu Putih, Mesin Otomatis Pengering Tangan, Mesin Otomatis Handsanitizer, Thermogun, Sarung Tangan.
- Akun 522192 Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 dengan Pagu Rp. 179.316.000,- dan Terealisasi Sebesar Rp. 179.316.000,- . Anggaran ini diperuntukan untuk Pelaksanaan Rapid Test PCR sebanyak 3 Kali dan 1 Kali Swab Test

Rekap Realisasi Anggaran Penanganan Covid 19 Tahun 2020

BPTP Jawa Barat

Kode	Uraian Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%	Uraian Penggunaan Dana
521841	Belanja Barang Persediaan Bahan Bantu Penanganan Covid-19	377.084.000	376.400.000	684.000	99,82	Vitamin, Obat, Masker, Madu, Disinfektan
522192	Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 (Rapid & Swab)	179.316.000	179.316.000	-	100,00	Rapid Test dan Swab
	Total	556.400.000	555.716.000	684.000	99,88	